



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN 2026**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun naskah Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun tiap tahun ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran untuk mendanai program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Selain itu untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program / kegiatan akan dilaporkan dalam LKjIP tahun 2026 nanti.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini sebagai penjabaran/pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga isi yang terkandung dalam Rencana Kerja (Renja) ini mengacu pada dokumen Renstra yang dimaksud.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada tahun-tahun yang akan datang.

Magetan, 25 November 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP 197212211993021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V PENUTUP	51
5.1 Catatan Penting	51
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	51
5.3 Rencana Tindak Lanjut	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2026 mengacu pada RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2026. Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini juga mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2025-2029 serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung yaitu pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Serta dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini berisi sasaran kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2026 berikut indikator-indikator sasarannya. Selain itu juga diuraikan tentang program/kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah dilakukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 08 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 24).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Sosial;
2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Dinas Sosial;
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Sosial dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029;
3. Menyesuaikan rencana kegiatan dan pendanaan Dinas Sosial Tahun 2026 sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sistematika Rancangan Renja Perangkat Daerah

BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2	Landasan Hukum	Uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional maupun lokal.
1.3	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.
1.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Memuat hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, dikaitkan dengan target capaian Renstra.
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta isu-isu strategis lainnya.
2.4	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	Membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para masyarakat, dan pengumpulan informasi dari pengamatan lapangan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.3	Program dan Kegiatan	Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya.

BAB V PENUTUP

Berisikan hal-hal penting lainnya yang dianggap perlu. Juga dicantumkan tanggal, nama Kepala Perangkat Daerah dan stempel.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 untuk mengetahui progress capaian sasaran yang telah ditetapkan. Capaian terhadap hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dan perkiraan realisasi capaian sampai dengan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Magetan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Magetan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN Dinas Sosial terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Sosial	85	angka	-	-	84	angka	84	angka	100.00	84.5	angka	84.5	angka	99.41
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	162	dokumen	-	-	54	dokumen	54	dokumen	100.00	54	dokumen	108	dokumen	66.67
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	dokumen	-	-	7	dokumen	7	dokumen	100.00	7	dokumen	14	dokumen	66.67

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141	laporan	-	-	47	laporan	47	laporan	100.00	47	laporan	94	laporan	66.67
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	100	persen	-	-	90	persen	97.6	persen	108.44	90	persen	97.6	persen	97.60
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1050	orang/bulan	-	-	350	orang/bulan	348	orang/bulan	99.43	312	orang/bulan	660	orang/bulan	62.86
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36	laporan	-	-	12	laporan	12	laporan	100.00	12	laporan	24	laporan	66.67
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	69	orang	-	-	25	orang	25	orang	100.00	-	orang	25	orang	36.23
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	69	orang	-	-	30	orang	30	orang	100.00	-	orang	30	orang	43.48
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36	paket	-	-	12	paket	12	paket	100.00	12	paket	24	paket	66.67
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	paket	-	-	12	paket	12	paket	100.00	6	paket	18	paket	50.00
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	paket	-	-	12	paket	12	paket	100.00	12	paket	24	paket	66.67

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	paket	-	-	12	paket	12	paket	100.00	8	paket	20	paket	55.56
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	paket	-	-	12	paket	12	paket	100.00	12	paket	24	paket	66.67
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	paket	-	-	12	paket	12	paket	100.00	6	paket	18	paket	50.00
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	dokumen	-	-	12	dokumen	12	dokumen	100.00	12	dokumen	24	dokumen	66.67
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	laporan	-	-	12	laporan	12	laporan	100.00	12	laporan	24	laporan	66.67
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108	laporan	-	-	36	laporan	36	laporan	100.00	36	laporan	72	laporan	66.67
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	-	-	12	laporan	12	laporan	100.00	12	laporan	24	laporan	66.67
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	laporan	-	-	12	laporan	12	laporan	100.00	12	laporan	24	laporan	66.67
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	laporan	-	-	12	laporan	12	laporan	100.00	12	laporan	24	laporan	66.67

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	27	unit	-	-	9	unit	9	unit	100.00	9	unit	18	unit	66.67
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	unit	-	-	1	unit	1	unit	100.00	1	unit	2	unit	66.67
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	unit	-	-	6	unit	6	unit	100.00	6	unit	12	unit	66.67
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	unit	-	-	1	unit	1	unit	100.00	1	unit	2	unit	66.67
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	unit	-	-	1	unit	1	unit	100.00	1	unit	2	unit	66.67
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	100	persen	-	-	0.03	persen	0.03	persen	100.00	100	persen	100	persen	100.00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS dan PMKS yang Meningkatkan Kesejahteraan Sosialnya	100	persen	-	-	0.03	persen	0.03	persen	100.00	100	persen	100	persen	100.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	54	orang	-	-	-	orang	0	orang	-	0	orang	0	orang	0.00
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	54	orang	-	-	18	orang	18	orang	100.00	18	orang	36	orang	66.67
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	300	keluarga	-	-	50	keluarga	48	keluarga	96.00	40	keluarga	88	keluarga	29.33
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	330	lembaga	-	-	331	lembaga	331	lembaga	100.00	195	lembaga	526	lembaga	159.39
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100	persen	-	-	100	persen	100	persen	100.00	100	persen	100	persen	100.00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100	persen	-	-	100	persen	100	persen	100.00	100	persen	100	persen	100.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengemis di Luar Panti Sosial															
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1620	orang	-	-	400	orang	353	orang	88.25	375	orang	728	orang	44.94
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	300	orang	-	-	50	orang	50	orang	100.00	50	orang	100	orang	33.33
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	315	orang	-	-	100	orang	100	orang	100.00	122	orang	222	orang	70.48
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	150	orang	-	-	50	orang	50	orang	100.00	25	orang	75	orang	50.00
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	170	orang	-	-	50	orang	50	orang	100.00	25	orang	75	orang	44.12
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1200	orang	-	-	300	orang	300	orang	100.00	100	orang	400	orang	33.33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pengemis dan Masyarakat	Kewenangan Kabupaten/Kota														
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150	orang	-	-	50	orang	50	orang	100.00	20	orang	70	orang	46.67
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	orang	-	-	50	orang	50	orang	100.00	20	orang	70	orang	46.67
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100	persen	-	-	100	persen	100	persen	100.00	100	persen	100	persen	100.00
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	150	orang	-	-	50	orang	50	orang	100.00	20	orang	70	orang	46.67
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	persen	-	-	7.28	persen	7.28	persen	100.00	100	persen	100	persen	100.00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	100	persen	-	-	7.28	persen	7.28	persen	100.00	100	persen	100	persen	100.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	33878 4	orang	-	-	11268 4	orang	11268 4	orang	100.00	11403 8	orang	22672 2	orang	66.92
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12650	keluarga	-	-	4000	keluarga	4000	keluarga	100.00	5000	keluarga	9000	keluarga	71.15
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Penanganan Bencana	100	persen	-	-	100	persen	100	persen	100.00	100	persen	100	persen	100.00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	600	orang	-	-	200	orang	200	orang	100.00	100	orang	300	orang	50.00
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300	orang	-	-	200	orang	200	orang	100.00	100	orang	300	orang	100.00
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300	orang	-	-	200	orang	200	orang	100.00	50	orang	250	orang	83.33
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Terselenggara dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	30	kali	-	-	10	kali	10	kali	100.00	10	kali	20	kali	66.67

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	126	orang	-	-	45	orang	45	orang	100.00	45	orang	90	orang	71.43
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola Dengan Baik	100	persen	-	-	100	persen	100	persen	100.00	100	persen	100	persen	100.00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	100	persen	-	-	100	persen	100	persen	100.00	100	persen	100	persen	100.00
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3	makam	-	-	1	makam	1	makam	100.00	1	makam	2	makam	66.67
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	21	laporan	-	-	7	laporan	7	laporan	100.00	7	laporan	14	laporan	66.67

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra, secara garis besar realisasi kinerja Dinas Sosial sudah sesuai dengan target perencanaan. Namun masih terdapat beberapa target kinerja yang belum optimal capaian kinerjanya. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerjanya sudah baik, namun terdapat sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan pada tahun 2024 namun tidak dilaksanakan pada tahun 2025 karena penyesuaian prioritas dan alokasi sumber daya. Begitu pula, pada Program Pemberdayaan Sosial capaian kinerjanya sudah baik, namun terdapat sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang dianggarkan pada Renja Tahun 2025 namun diefisiensi pada Perubahan Renja 2025 karena anggaran sub kegiatan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025, sehingga kegiatan peningkatan kompetensi untuk Pekerja Sosial Masyarakat di kolaborasikan dengan peningkatan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, sehingga tidak mengurangi capaian outcome Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK, IKU maupun indikator lain yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial serta norma dan standar pelayanan sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan sosial.

Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Magetan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU/ Indikator Lain	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya %		IKK	100	-	-	-	96	-	-	-	Indikator sudah tidak digunakan
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti %	SPM	IKK	100	100	100	100	100	82.45	100	100	Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III
3	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti %	SPM	IKK	100	100	100	100	98.67	78.56	100	100	Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III
4	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti %	SPM	IKK	100	100	100	100	99.92	86.82	100	100	Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III
5	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti %	SPM	IKK	100	100	100	100	100	80.89	100	100	Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III
6	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti %		IKK	100	100	100	100	100	-	100	100	
7	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar %		IKK	100	100	100	100	100	-	100	100	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU/ Indikator Lain	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
8	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota %	SPM	IKK	100	100	100	100	100	79.13	100	100	Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III
9	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar %		IKK	100	100	100	100	100	-	100	100	
10	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar %		IKK	100	100	100	100	100	-	100	100	
11	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti %		IKK	100	100	100	100	100	-	100	100	
12	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar %		IKK	100	100	100	100	100	-	100	100	
13	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar %		IKK	66.58	66.58	66.59	66.6	66.58	-	66.59	66.6	
14	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi %		IKK	0.20	0.20	0.21	0.22	0.20	-	0.21	0.22	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU/ Indikator Lain	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
15	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun %		IKK	100	100	100	100	100	-	100	100	
16	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial %		IKU	99.98	-	-	-	99.88	-	-	-	IKU Renstra 2024-2026
17	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial %		IKU	0.28	-	-	-	0.259	-	-	-	IKU Renstra 2024-2026
18	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial %		IKU	0.04	-	-	-	0.038	-	-	-	IKU Renstra 2024-2026
19	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial %		IKU	5.3	-	-	-	5.3	-	-	-	IKU Renstra 2024-2026
20	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar Angka		IKU	-	58.83	58.84	58.85	-	-	58.83	58.84	IKU Renstra 2025-2029
21	Nilai Dimensi Peranan Sosial Angka		IKU	-	76.87	76.88	76.89	-	-	76.87	76.88	IKU Renstra 2025-2029
22	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi Angka		IKU	-	60.09	60.10	60.11	-	-	60.09	60.10	IKU Renstra 2025-2029
23	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman %		IKU	-	31.31	31.32	31.33	-	-	31.31	31.32	IKU Renstra 2025-2029
24	Nilai SAKIP Nilai		IKU	85	92.34	93.32	93.33	92.33	93.31	93.32	93.33	IKU Renstra 2025-2029
25	Indeks Kepuasan Masyarakat Skor		IKU	87.35	87.50	87.65	87.70	87.45	87.61	87.65	87.70	IKU Renstra 2025-2029

Tabel di atas menjelaskan target dan realisasi kinerja dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2027. Target tahun 2024 masih berdasarkan Renstra RPD 2024-2026 dan target mulai tahun 2025 sudah berdasarkan Renstra RPJMD 2025-2029. Untuk realisasi capaian 2024 sudah dapat dihitung namun untuk realisasi tahun 2025 belum bisa dihitung karena saat penyusunan dokumen Renja 2026 ini, program/kegiatan tahun 2025 masih berjalan. Namun ada beberapa indikator yang telah muncul realisasi capaian kinerjanya seperti Nilai SAKIP Dinas Sosial dan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial, sedangkan capaian indikator SPM yang sudah muncul di aplikasi e-SPM Bangda adalah sampai dengan triwulan 3 sesuai tabel di atas. Untuk tahun 2026 dan 2027, realisasi yang dihitung masih berupa proyeksi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas sosial Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat isu-isu penting yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan, diantaranya adalah:

1. Akses kesehatan yang belum optimal bagi kelompok rentan meliputi kesenjangan akses akibat kemiskinan dan lokasi geografis, keterbatasan pembiayaan, dan inefisiensi program jaminan kesehatan, kurangnya sumber daya dan tenaga kesehatan yang memadai, ketidaksesuaian implementasi kebijakan nasional di daerah, serta kurangnya kesadaran dan perilaku hidup sehat di masyarakat yang berdampak pada peningkatan kasus penyakit dan masalah kesehatan lainnya;
2. Ketepatan jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat berpusat pada optimalisasi penargetan sasaran, kelemahan mekanisme pendampingan, serta pentingnya sistem jaminan sosial dalam melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, isu-isu ini juga mencakup Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara optimal, perluasan cakupan dan kualitas program, serta reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang lebih baik;
3. Penyusunan dan pengelolaan Data Sosial Terpadu yang belum optimal, sehingga perencanaan kinerja menjadi kurang valid dan belum dapat menggambarkan keberhasilan dalam penanganan PPKS.

Berdasarkan uraian isu-isu penting di atas, sehingga pada Renja (Rencana Kerja) Dinas Sosial tahun 2026 langkah-langkah yang diambil adalah:

1. Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdapat kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang berisi kegiatan pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota dan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Kegiatan difokuskan pada penguatan basis data sosial terpadu dengan melaksanakan verifikasi dan validasi data serta penguatan monitoring pengusulan data dari Desa, Kelurahan dan Kecamatan, sehingga perlindungan dan jaminan sosial menjadi lebih tepat sasaran;
2. Meningkatkan upaya penanganan PPKS dengan meningkatkan kualitas dalam penyaluran bantuan sosial, seperti bantuan sosial Bunda Kasih, ASPD (Asistensi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas), bantuan modal usaha bagi WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi), BLT DBHCHT bagi pekerja pabrik rokok, petani tembakau dan masyarakat yang masuk dalam Kemiskinan Ekstrem, penanganan korban bencana serta peningkatan rehabilitasi sosial bagi PPKS;
3. Meningkatkan kapasitas pilar-pilar sosial (TKSK, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tagana, PSM dan Karang Taruna); serta
4. Meningkatkan sinergitas program kegiatan dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kementerian Sosial serta lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara RKPD dengan kebutuhan Perangkat Daerah, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarannya.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Tahun 2026
Dinas Sosial Kabupaten Magetan

RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				10,164,754,432	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				10,164,754,432			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Dinas Sosial	Kab. Magetan	84.51	Skor	4,393,154,432	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Kab. Magetan	84.51	Skor	4,393,154,432	Perbedaan Indikator dan target Program
	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial		92.5	%			Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran		98.32	%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Magetan	55	dokumen	26,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Magetan	55	dokumen	26,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	7	dokumen	13,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	7	dokumen	13,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	48	laporan	13,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	48	laporan	13,000,000	

RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Magetan	97.61 %	3,436,478,900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Magetan	97.61 %	3,436,478,900	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	308 orang/bulan	3,424,478,900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	308 orang/bulan	3,424,478,900	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Magetan	12 laporan	12,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Magetan	12 laporan	12,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan	72 paket	144,175,532	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan	72 paket	144,175,532	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	6 paket	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	6 paket	5,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 paket	40,675,532	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 paket	40,675,532	

RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan	12 paket	16,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan	12 paket	16,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 paket	20,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 paket	20,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan	6 paket	5,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan	6 paket	5,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Magetan	12 dokumen	7,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Magetan	12 dokumen	7,500,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	12 laporan	50,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	12 laporan	50,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan	36 laporan	642,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan	36 laporan	642,500,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Magetan	12 laporan	85,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Magetan	12 laporan	85,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 laporan	15,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 laporan	15,000,000	

RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 laporan	542,500,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 laporan	542,500,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kab. Magetan	9 unit	144,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kab. Magetan	9 unit	144,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Magetan	1 unit	50,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Magetan	1 unit	50,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Magetan	6 unit	70,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Magetan	6 unit	70,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Magetan	1 unit	14,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Magetan	1 unit	14,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Magetan	1 unit	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Magetan	1 unit	10,000,000	

RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensi dan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Kab. Magetan	100 %	485,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensi dan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Kab. Magetan	100 %	485,000,000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	100 %	485,000,000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	100 %	485,000,000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	37 keluarga	85,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	37 keluarga	85,000,000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	16 lembaga	335,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	16 lembaga	335,000,000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Magetan	38 orang	65,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Magetan	38 orang	65,000,000	

RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kab. Magetan	100 %	1,595,000,000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kab. Magetan	100 %	1,595,000,000	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Kab. Magetan	100 %	1,585,000,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Kab. Magetan	100 %	1,585,000,000	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Magetan	375 orang	1,311,705,000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Magetan	375 orang	1,311,705,000	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Magetan	30 orang	21,000,000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Magetan	30 orang	21,000,000	

RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	10 orang	10,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	10 orang	10,000,000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	40 orang	25,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	40 orang	25,000,000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	30 orang	21,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	30 orang	21,000,000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	250 orang	85,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	250 orang	85,000,000	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	75 orang	92,495,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Magetan	75 orang	92,495,000	

RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
						Kewenangan Kabupaten/Kota				
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	25 orang	18,800,000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	25 orang	18,800,000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Kab. Magetan	100 %	10,000,000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Kab. Magetan	100 %	10,000,000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	25 orang	10,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	25 orang	10,000,000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Magetan	100 %	3,560,559,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Magetan	100 %	3,560,559,000	

RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang Terverifikasi Terhadap Total Data yang Masuk	Kab. Magetan	100 %	3,560,559,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang Terverifikasi Terhadap Total Data yang Masuk	Kab. Magetan	100 %	3,560,559,000	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Magetan	2720 orang	90,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Magetan	2720 orang	90,000,000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	4000 orang	3,470,559,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	4000 orang	3,470,559,000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	Kab. Magetan	100 %	81,041,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	Kab. Magetan	100 %	81,041,000	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Kab. Magetan	75 orang	57,041,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Kab. Magetan	75 orang	57,041,000	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	75 orang	20,000,000	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	75 orang	20,000,000	

RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	75 orang	37,041,000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	75 orang	37,041,000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	10 kali	24,000,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	10 kali	24,000,000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	45 orang	24,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	45 orang	24,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	Kab. Magetan	100 %	50,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	Kab. Magetan	100 %	50,000,000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	Kab. Magetan	100 %	50,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	Kab. Magetan	100 %	50,000,000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	1 makam	40,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	1 makam	40,000,000	

RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	7 laporan	10,000,000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	7 laporan	10,000,000	

Berdasarkan tabel T-C 3.1 di atas, terdapat perbedaan indikator dan target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan dikarenakan RKPD ditetapkan terlebih dahulu dibandingkan dengan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam tahun 2026 ini terdapat program/kegiatan yang diusulkan kelompok masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) kepada Dinas Sosial Kabupaten Magetan, sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2026 merupakan perpaduan dari program/kegiatan yang sudah direncanakan tahun 2026 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya dan hasil Musrenbang dari Masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2026 Kabupaten Magetan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Magetan	Persentase PSKS di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensi dan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000	Hibah uang senilai Rp. 50.000.000 kepada Karang Taruna Desa Lembahbang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menjadi arah besar pembangunan nasional yang memandu kebijakan dan perencanaan ke depan, termasuk RPJMN 2025-2029 sebagai implementasi awal menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 tanggal 10 Februari 2025 dituangkan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yang dikenal dengan Delapan Misi Presiden atau “**Asta Cita**”. Berikut delapan prioritas pembangunan nasional tersebut, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan delapan prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kementerian Sosial Republik Indonesia mendukung dalam pencapaian Prioritas Nasional (PN.6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, dengan program prioritas Kementerian Sosial (PP) Perlindungan sosial adaptif dan inklusif yang diturunkan kepada kegiatan prioritas penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui Kartu Kesejahteraan.

Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran. Tujuan pertama adalah meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan dengan sasaran terwujudnya sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif. Sedangkan tujuan kedua adalah tata kelola Kementerian Sosial yang agile, berkualitas, dan efisien dengan sasaran meningkatnya tata kelola kesejahteraan sosial yang berdampak. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan:

- a. Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang terdiri dari Program PKH, BPNT, Penanganan Bencana dan Bantuan Langsung Berkelanjutan (BLB);
- b. Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari Program ATENSI, YAPI, Bantuan Permakanan, Pemberian Alat Bantu, *care economy*; serta

- c. Pemberdayaan Sosial yang terdiri dari Program PPSE dan Rumah usaha sederhana.

Dinas Sosial Kabupaten Magetan memiliki program kegiatan yang sejalan dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, diantaranya:

- a. Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang terdiri dari Program Sembako, ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas), Penanganan Bencana, BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan fasilitasi jaminan kesehatan PBID (Peserta Bantuan Iuran Daerah);
- b. Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari Program Bunda Kasih, pemberian alat bantu, shelter rumah lansia, layanan rumah terapi bagi disabilitas CP, pengiriman peserta pelatihan, layanan reunifikasi keluarga, serta layanan rujukan bagi PPKS dan disabilitas); serta
- c. Pemberdayaan Sosial yang terdiri dari pemberian bantuan modal usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan pemberdayaan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial).

Pada tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Magetan juga mendukung dalam pelaksanaan Kebijakan Nasional Sekolah Rakyat, yakni satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dan penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

- Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

B. Sasaran

- Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan
- Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis
- Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan
- Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial
- Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial

C. Indikator Tujuan

- Indeks Kesejahteraan Sosial

D. Indikator Sasaran

- Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar
- Nilai Dimensi Peranan Sosial
- Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi
- Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman
- Nilai SAKIP
- Indeks Kepuasan Masyarakat

Target sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2026 tercantum dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Target Sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2026

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	64,96 Indeks
	1. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	58,84 Angka
	2. Meningkatkan Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	76,88 Angka
	3. Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	60,10 Angka
	4. Meningkatkan Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman	31,32 %
	5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP	93,32 Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,65 Skor

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan memperhatikan pada:

- a. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2025;
- b. Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD tahun 2025;
- c. Hasil review terhadap RKPD Tahun 2026;
- d. Hasil penelaahan terhadap usulan program/ kegiatan masyarakat;
- e. Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi; serta
- f. Isu-isu/ permasalahan penting yang dihadapi selama tahun 2025 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, yang disandingkan dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2026.

Dengan memperhatikan poin-poin di atas, maka program/ kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Magetan pada Tahun 2026 terdiri dari 6 Program, 12 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan sebagaimana disampaikan pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun untuk rincian anggaran belanja setiap program perangkat daerah pada Renja Dinas Sosial Kabupaten Magetan periode tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Sosial Kabupaten Magetan

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Magetan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	BIDANG URUSAN SOSIAL				10,164,754,432				9,793,302,766
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Outcome: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional Serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan		84.51 Skor	4,393,154,432			84.52 Skor	5,253,302,766
		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran		98.32 %				98.33 %	
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu		55 Dokumen	26,000,000			55 Dokumen	60,000,000
1.06.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	7 Dokumen	13,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 Dokumen	30,000,000
1.06.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Output: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	48 Laporan	13,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		48 Laporan	30,000,000
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Output: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah		97.61 %	3,436,478,900			97.62 %	3,363,302,766
1.06.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	308 Orang /bulan	3,424,478,900	Dana Alokasi Umum (DAU)		336 Orang /bulan	3,333,302,766
1.06.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD								
	Output: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Magetan	12 Laporan	12,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	30,000,000
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Output: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		72 Paket	144,175,532			78 Paket	430,000,000
1.06.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor								
	Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	6 Paket	5,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 Paket	10,000,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01. 2.06.000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	40,675,532	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Paket	150,000,000
1.06.01. 2.06.000 3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	16,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Paket	50,000,000
1.06.01. 2.06.000 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	20,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Paket	40,000,000
1.06.01. 2.06.000 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan	6 Paket	5,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Paket	20,000,000
1.06.01. 2.06.000 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
	Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Dokumen	7,500,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Dokumen	10,000,000
1.06.01. 2.06.000 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	12 Laporan	50,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	150,000,000
1.06.01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36 Laporan	642,500,000			36 Laporan	980,000,000
1.06.01. 2.08.000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Laporan	85,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	100,000,000
1.06.01. 2.08.000 3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Output: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Laporan	15,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	30,000,000
1.06.01. 2.08.000 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Laporan	542,500,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	850,000,000
1.06.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Output: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara		9 Unit	144,000,000			9 Unit	420,000,000
1.06.01. 2.09.000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Magetan	1 Unit	50,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	70,000,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01. 2.09.000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Magetan	6 Unit	70,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 Unit	100,000,000
1.06.01. 2.09.000 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Output: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Magetan	1 Unit	14,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	200,000,000
1.06.01. 2.09.001 0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Output: Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Magetan	1 Unit	10,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	50,000,000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
	Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensi dan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		100 %	485,000,000			100 %	1,250,000,000
1.06.02. 2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								
	Output: Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100 %	485,000,000			100 %	1,250,000,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.02. 2.03.000 3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Output: Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	37 Keluarga	85,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		200 Keluarga	450,000,000
1.06.02. 2.03.000 4	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Output: Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	16 Lembaga	335,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		42 Lembaga	695,000,000
1.06.02. 2.03.001 4	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Output : Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Magetan	38 Orang	65,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		38 Orang	105,000,000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
	Outcome: Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		100 %	1,595,000,000			100 %	2,220,000,000
1.06.04. 2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Output : Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Prioritas	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar		100 %	1,585,000,000			100 %	2,195,000,000
1.06.04. 2.01.000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan								
	Output: Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	375 Orang	1,311,705,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		400 Orang	1,550,000,000
1.06.04. 2.01.000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang								
	Output: Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	30 Orang	21,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Orang	30,000,000
1.06.04. 2.01.000 3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu								
	Output: Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	10 Orang	10,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		50 Orang	268,000,000
1.06.04. 2.01.000 4	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								
	Output: Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	40 Orang	25,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		40 Orang	30,000,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04. 2.01.000 5	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
	Output: Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	30 Orang	21,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Orang	30,000,000
1.06.04. 2.01.000 6	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat								
	Output: Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	250 Orang	85,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		250 Orang	120,000,000
1.06.04. 2.01.000 8	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar								
	Output: Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	75 Orang	92,495,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		75 Orang	120,000,000
1.06.04. 2.01.001 2	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan								
	Output: Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	25 Orang	18,800,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		50 Orang	47,000,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								
	Output: Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Lainnya selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti		100 %	10,000,000			100 %	25,000,000
1.06.04.2.02.0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA								
	Output: Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	25 Orang	10,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		35 Orang	25,000,000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
	Outcome: Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		100 %	3,560,559,000			100 %	860,000,000
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
	Output: Terlaksananya Pengentasan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Data Fakir Miskin yang Terverifikasi Terhadap Total Data yang Masuk		100 %	3,560,559,000			100 %	860,000,000
1.06.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Output: Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Magetan	272,045 Orang	90,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		337,034 Orang	200,000,000
1.06.05. 2.02.000 3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								
	Output: Terpenuhiya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	4000 Orang	3,470,559,000	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)		2750 Orang	660,000,000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
	Outcome: Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani		100 %	81,041,000			100 %	145,000,000
1.06.06. 2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								
	Output: Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial		75 Orang	57,041,000			200 Orang	95,000,000
1.06.06. 2.01.000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan								
	Output: Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	75 Orang	20,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		200 Orang	75,000,000
1.06.06. 2.01.000 5	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial								
	Output: Terpenuhiya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	75 Orang	37,041,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 Orang	20,000,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								
	Output: Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		10 Kali	24,000,000			10 Kali	50,000,000
1.06.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								
	Output: Terpenuhi Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	45 Orang	24,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		45 Orang	50,000,000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								
	Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik		100 %	50,000,000			100 %	65,000,000
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
	Output: Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara		100 %	50,000,000			100 %	65,000,000
1.06.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
	Output: Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	1 Makam	40,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Makam	55,000,000
1.06.07.2.01.0003	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Output : Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	7 Laporan	10,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 Laporan	10,000,000

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

- a. Untuk keberhasilan pencapaian target Renja, seluruh unit yang ada di Dinas Sosial wajib segera menindaklanjuti dengan penyusunan *time schedule*/ rencana aksi pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu;
- b. Untuk menjamin sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program-program pembangunan daerah, agar dilakukan koordinasi internal dan lintas Perangkat Daerah serta pengendalian dan evaluasi pencapaian sasaran dilakukan secara intensif, sehingga diperoleh hasil maksimal dari pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Dalam melaksanakan program/kegiatan agar memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi;
- d. Apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran, agar segera dilakukan penyesuaian terhadap target-target kinerja.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

- a. Renja Dinas Sosial Tahun 2026 ini merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam menyusun rencana program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Untuk memastikan target-target di Renja tercapai, agar dilakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat segera diketahui pelaksanaan program/ kegiatan yang menemui kendala/ masalah agar segera dapat diambil langkah-langkah antisipasi.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Sosial digunakan sebagai dasar dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja masing-masing unit kerja/ aparatur Dinas Sosial. Selanjutnya dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai agar mengacu pada indikator kinerja target yang tercantum dalam Renja serta ditindaklanjuti juga dengan perjanjian kinerja secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas Sosial, pejabat administrator, pengawas, pelaksana serta pejabat fungsional.

Magetan, 25 November 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN



HARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Pembina Utama Muda
NIP 197212211993021002